

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021**

**1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
1	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Anak usia 3-6 tahun terserap pada jenjang PAUD rata-rata mengalami kenaikan 7% per tahun	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun	%	Untuk mengetahui kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)	$\text{APK PAUD 3-6 Tahun} = \frac{\text{Jumlah siswa PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 3 - 6 th.}} \times 100\%$	Bidang PAUD dan DIKMAS	
		Anak lulus sekolah yg tidak melanjutkan dan terlayani Paket A,B dan C rata-rata mengalami kenaikan 5% per tahun		Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C	%		$\text{Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C} = \frac{\text{Jumlah siswa lulus Paket A, B, C}}{\text{Jumlah siswa Paket A, B, C}} \times 100\%$	Bidang PAUD dan DIKMAS	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
		Anak usia 7-12 tahun terserap pada jenjang SD/MI rata-rata mengalami kenaikan 0,5% per tahun	Meningkatnya kualitas Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	Untuk mengetahui Ketersediaan dan Kualitas Pendidikan Dasar (DIKDAS)	$\text{APK SD/MI} = \frac{\text{Jumlah siswa SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 th}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan DIKDAS	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%		$\text{APK SD/MI} = \frac{\text{Jumlah siswa SD/MI usia 7 -12 th}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 th}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan DIKDAS	
		Anak usia 13-15 tahun terserap pada jenjang SMP/MTs rata-rata mengalami kenaikan 0,5% per tahun		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%		$\text{APK SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13-15 th}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan DIKDAS	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%		$\text{APK SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs usia 13 - 15 th}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13-15 th}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan DIKDAS	
		Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat jenjang yang sama rata-rata mengalami penurunan 0,05% per tahun		Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%		$\text{APtS SD/MI} = \frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan DIKDAS	
				Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%		$\text{APtS SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan DIKDAS	

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET/ KRITERIA</b>
		Jumlah guru yang bersertifikasi rata-rata mengalami kenaikan 1% per tahun	Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru bersertifikasi pendidik	%	Untuk mengetahui kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	$\text{Persentase guru bersertifikasi pendidik} = \frac{\text{Jumlah guru bersertifikasi}}{\text{Jumlah guru}} \times 100\%$	Bidang GTK	

**2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan ibu	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan antenatal pada ibu hamil	%	Amanat dari permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal pertama kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja puskesmas dalam 1 tahun dikali 100 %	Dinkes	
		Persentase pelayanan gizi Masyarakat		Cakupan pelayanan persalinan sesuai standar	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu dibagi Jumlah semua ibu bersalin di wilayah kabupaten Blora tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 %	Dinkes	
		Persentase desa siaga aktif		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 1 kali sesuai dengan standar dibagi jumlah semua bayi baru lahir di wilayah Kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dikali 100 %	Dinkes	
		Persentase Tenaga kesehatan sesuai standar		Cakupan pelayanan jaminan kesehatan	%	Amanat Undang Undang tentang Jaminan Kesehatan	Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibagi Jumlah Penduduk di Kabupaten dikalikan 100%	Dinkes	
		Persentase Pelayanan kesehatan dasar		Cakupan screning kesehatan anak usia pendidikan dasar	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jumlah siswa sekolah pendidikan dasar yang dilakukan skrining kesehatan dibagi Jumlah seluruh siswa sekolah pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100 %	Dinkes	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
			Meningkatnya Pengendalian Penyakit	Persentase rumah tangga yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	Rumah merupakan tempat tinggal yang kondisinya harus sehat dan memenuhi persyaratan kesehatan sehingga harus dilakukan pembinaan  Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  Banyaknya faktor lingkungan yang kurang sehat yang mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya dan masyarakat disekitarnya	Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan <i>dibagi</i> jumlah rumah yang diperiksa <i>dikali</i> 100 %	Dinkes	
				Cakupan penemuan kasus TB	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jumlah Kasus TB di obati dilaporkan dibagi Jumlah Penduduk dikalikan 100%	Dinkes	
				Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	%	Sanitasi Tempat – Tempat Umum merupakan tempat dimana orang – orang berkumpul dan berhubungan langsung dengan lingkungan yang bisa mempengaruhi kesehatannya.  Kurangnya pengertian dan pengetahuan masyarakat mengenai masalah kesehatan	Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan <i>dibagi</i> jumlah TTU yang diperiksa <i>dikali</i> 100 %	Dinkes	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
						Kondisi fasilitas sanitasi TTU yang kurang baik.			
						Dimungkinkan terjadinya penularan penyakit akibat faktor lingkungan TTU.			
				Cakupan Desa dengan UCI	%	Program Nasional yang harus dilaksanakan	Jumlah Uci desa Dibagi Jumlah Desa dikalikan 100%	Dinkes	
				Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jumlah Orang resiko HIV di layani dibagi Jmlh orang resiko HIV tahun ini yang di layani dikalikan 100%	Dinkes	
			Meningkatnya akses dan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi	%	Merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar	Jumlah puskesmas yang terakreditasi dibagi jumlah kecamatan yang ada di kab tersebut dikali 100 %	Dinkes	
						Kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan harus dijamin			
						Sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkesinambungan			
						Untuk memastikan bahwa puskesmas memberikan pelayanan sesuai dengan standar			
						Salah satu persyaratan kredensial BPJS			

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
				Persentase prasarana puskesmas yang sesuai standar	%	Pemenuhan permenkes 74 tentang puskesmas	Jumlah prasarana Puskesmas sesuai standar dibagi semua prasarana Puskesmas dikali 100 %	Dinkes	
				Persentase sarana puskesmas yang sesuai standar	%	Pemenuhan permenkes 74 tentang puskesmas	Jumlah sarana Puskesmas sesuai standar dibagi semua sarana Puskesmas dikali 100 %	Dinkes	
			Meningkatnya mutu ketersediaan farmasi	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas	%	Kewajiban Pemerintah untuk penyediaan obat pelayanan dasar	Jumlah obat yang tersedia dlm waktu tertentu di bagi jumlh kebutuhan atau pemakaian rerata dalam periode tertentu	Dinkes	
				Persentase ketersediaan vaksin di Puskesmas	%	Kewajiban Pemerintah untuk penyediaan dasar pelayanan dasar	Jumlah Vaksin yang tersedia dlm waktu tertentu di bagi jumlh kebutuhan atau pemakaian rerata dalam periode tertentu	Dinkes	
			Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompetens sesuai dengan fungsinya	%	Pemenuhan permenkes 74 tentang puskesmas	Jumlah tenaga berstandar di bagi jumlah tenaga belum terstandar dikalikan 100%	Dinkes	
			Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu dengan tehnologi	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan primer yang melaporkan tepat waktu di bagi semua fasilitas kesehatan primer dikalikan 100 %	Dinkes	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu dengan teknologi	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan Rujukan yang melaporkan tepat waktu di bagi semua fasilitas kesehatan Rujukan dikalikan 100 %	Dinkes	
			Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan	Cakupan Screening kesehatan pada usia produktif	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan yaitu Pemerintah daerah wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 15-59 th mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 th dibagi Jumlah warga usia 15-59 th yg ada di wilayah kab.blora dikalikan 100%	Dinkes	
				Cakupan pelayanan kesehatan Lansia	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jumlah masyarakat disuatu tempat yang ber usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi semua masyarakat di wilayah tersebut dikalikan 100%	Dinkes	
				Cakupan pelayanan hipertensi	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jlm penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dlm kurun waktu satu th dibagi jmlh estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dlm kurun waktu satu th pada tahun yang sama dikalikan 100%	Dinkes	



<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET/ KRITERIA</b>
				Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Militus	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jlm penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dlm kurun waktu satu th dibagi jmlh estimasi penderita DM berdasarkan angka prevalensi kab/kota dlm kurun waktu satu th pada tahun yang sama dikalikan 100%	Dinkes	
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada Orang Dengan gangguan Jiwa	%	Amanat dari permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	Jlm penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dlm kurun waktu satu th dibagi jmlh estimasi penderita ODGJ berat berdasarkan angka prevalensi kab/kota dlm kurun waktu satu th pada tahun yang sama dikalikan 100%	Dinkes	

**3. INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD R. SOETIJONO BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	%	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat	1. Bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot/jumlah unsur = $1/14 = 0,071$ 2. IKM = Jumlah nilai per unsur / jumlah unsur terisi x 0,071 3. Interpretasi = IKM x 25	RSUD R. Soetijono Blora	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan yang bermutu dan memuaskan	Status Akreditasi RS versi KARS	Status	Sebagai standarisasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	-	RSUD R. Soetijono Blora	
			BOR	%	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam setahun}} \times 100\%$	RSUD R. Soetijono Blora		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
				AVLOS	hari	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$	RSUD R. Soetijono Blora	
				TOI	hari	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{(\text{jumlah tempat tidur} \times \text{periode}) - \text{hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	RSUD R. Soetijono Blora	
				BTO	kali	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	RSUD R. Soetijono Blora	
				NDR	‰	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 1000 \text{ permil}$	RSUD R. Soetijono Blora	
				GDR	‰	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 1000 \text{ permil}$	RSUD R. Soetijono Blora	

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET / KRITERIA</b>
				Jumlah pasien Rawat Inap	orang	Untuk mengetahui jumlah pelayanan terhadap masyarakat	-	RSUD R. Soetijono Blora	
				Jumlah pasien Rawat Jalan	orang	Untuk mengetahui jumlah pelayanan terhadap masyarakat	-	RSUD R. Soetijono Blora	

**4. INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD R. SOEPRAPTO CEPU**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	%	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat	1. Bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot/jumlah unsur = $1/14 = 0,071$ 2. IKM = Jumlah nilai per unsur / jumlah unsur terisi x 0,071 3. Interpretasi = IKM x 25	RSUD R. Soeprapto Cepu	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan yang bermutu dan memuaskan	Status Akreditasi RS versi KARS	Status	Sebagai standarisasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	-	RSUD R. Soeprapto Cepu	
				BOR	%	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam setahun}} \times 100\%$	RSUD R. Soeprapto Cepu	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
				AVLOS	hari	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$	RSUD R. Soeprapto Cepu	
				TOI	hari	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{(\text{jumlah tempat tidur} \times \text{periode}) - \text{hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	RSUD R. Soeprapto Cepu	
				BTO	kali	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	RSUD R. Soeprapto Cepu	
				NDR	‰	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 1000 \text{ permil}$	RSUD R. Soeprapto Cepu	
				GDR	‰	Untuk mengetahui tingkat prestasi pelayanan di Rawat Inap	$\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 1000 \text{ permil}$	RSUD R. Soeprapto Cepu	

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET / KRITERIA</b>
				Jumlah pasien Rawat Inap	orang	Untuk mengetahui jumlah pelayanan terhadap masyarakat	-	RSUD R. Soeprapto Cepu	
				Jumlah pasien Rawat Jalan	orang	Untuk mengetahui jumlah pelayanan terhadap masyarakat	-	RSUD R. Soeprapto Cepu	

**5. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PUPR KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Kecepatan kendaraan rata - rata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Persentase Jalan kondisi baik	%	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan Meningkatnya Kecepatan Kendaraan Bermotor 40 Km/jam	Persentase Jalan kondisi baik = $\frac{\text{Panjang Jalan kondisi baik}}{\text{Panjang Jalan}} \times 100$	DPUPR	
		Berkurangnya waktu tempuh rata - rata		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik dan Berkurangnya Waktu Tempuh 10 menit	Persentase Jembatan dalam kondisi baik = $\frac{\text{Jumlah Jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Jembatan}} \times 100$	DPUPR	
2	Meningkatnya panjang jaringan /saluran irigasi kondisi baik	Luas Sawah yang teraliri air irigasi	Meningkatnya Lahan Sawah teraliri dalam cakupan DI	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sehingga meningkatkan Luas Sawah yang teraliri air irigasi 244 Ha	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik = $\frac{\text{Panjang jaringan Irigasi (DI) dalam kondisi Baik}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi (D)}} \times 100$	DPUPR	
3	Meningkatnya pengelolaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPI/ HGB	Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Ruang	Perda RDTR yang ditetapkan	Perda	Meningkatnya Peraturan Tata Ruang Sehingga terdapat landasan Hukum dalam penegakan Tata Ruang	Perda RDTR yang ditetapkan = Jumlah Perda RDTR	DPUPR	



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
				Ruang Publik yang berubah peruntukannya	%	Ruang publik yang berubah peruntukannya sebagai indikator tidak adanya ruang publik yang berubah fungsi	$\frac{\text{Perubahan Ruang Publik}}{\text{Luas Ruang Publik}} \times 100$	DPUPR	

**6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS RUMKIMHUB KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Indeks persepsi infrastruktur perumahan dan permukiman	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang berkurang	unit	Merupakan pelayanan perangkat daerah untuk mengevaluasi berkurangnya rumah tidak layak huni	Jumlah RTLH yang Berkurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DINRUMKIM HUB</li> <li>• Pemerintah Desa</li> <li>• Dinas PMD</li> </ul>	
			Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan	Persentase berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	%	Merupakan SPM yang sekaligus menjadi sasaran pembangunan nasional dan daerah	$\frac{\text{Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani Luas Total}}{\text{Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan}} \times 100\%$	DINRUMKIMHUB	
			Meningkatnya akses air minum dan pelayanan sanitasi	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	Merupakan SPM yang sekaligus menjadi sasaran pembangunan nasional dan daerah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum}}{\text{Jumlah Total Penduduk Seluruh Kabupaten}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DINRUMKIM HUB</li> <li>• PDAM</li> </ul>	
				Persentase Penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK	%	Merupakan SPM yang sekaligus menjadi sasaran pembangunan nasional dan daerah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Terlayani Tangki Septik/ MCK}}{\text{Jumlah Total Penduduk Seluruh Kabupaten}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DINRUMKIM HUB</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> </ul>	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
			Meningkatnya ketersediaan RTH Publik	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	Merupakan SPM yang juga merupakan pelayanan perangkat daerah untuk mengevaluasi ketersediaan RTH Publik	$\frac{\sum \text{Akhir Tahun Pencapaian SPM Luasan RTH Publik yang Tersedia}}{\sum \text{Kawasan Perkotaan Luasan RTH Publik dan Sekitarnya}} \times 100\%$	DINRUMKIMH UB	
			Meningkatnya pelayanan Penerangan Jalan Umum	Persentase panjang jalan yang dilayani Penerangan Jalan Umum	%	Merupakan pelayanan perangkat daerah untuk mengetahui kinerja penerangan jalan umum	$\frac{\text{Panjang jalan yang dilayani penerangan jalan umum}}{\text{Panjang jalan kabupaten keseluruhan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DINRUMKIM HUB</li> <li>• Pemerintah Desa</li> <li>• Dinas PMD</li> </ul>	
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana antar moda transportasi darat	Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat dalam kondisi baik	%	Karena ada korelasi dengan tujuan dan sesuai dengan sasaran dalam RPJMD terkait kondisi sarana dan prasarana, di antaranya rambu, marka, <i>guardrail</i> , APILL, dll	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat keseluruhan}} \times 100\%$	DINRUMKIMH UB	

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET/ KRITERIA</b>
				Persentase sarana dan prasarana antar moda dalam kondisi baik	%	Karena ada korelasi dengan tujuan dan sesuai dengan sasaran dalam RPJMD terkait kondisi sarana dan prasarana antar moda, diantaranya terminal dan halte	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasaran Antar Moda dalam Kondisi baik}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Antar Moda Keseluruhan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DINRUMKIM HUB</li> <li>• PDAM</li> </ul>	

**7. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATPOL PP KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda / Perkada di Kabupaten Blora	Meningkatnya penegakan Perda	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	Untuk mengevaluasi banyaknya pelanggaran ketertiban umum yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dilaporkan}} \times 100\%$	Satpol PP	
				Cakupan penegakan perda	%	Terkait langsung dengan tupoksi Satpol PP yaitu sebagai penegak peraturan perundang-undangan daerah	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan}} \times 100\%$	Satpol PP	
				Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	Sebagai wujud nyata tupoksi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kabupaten}}$	Satpol PP	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten	Rasio	Satuan linmas memiliki peran penting dalam memelihara keamanan, ketentraman umum, ketertiban dan perlindungan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten}}{\text{Jumlah RT dalam satu kabupaten}}$	Satpol PP	

**8. INDIKATOR KINERJA UTAMA BPBD KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Meningkatnya pelaksanaan kinerja program dan kegiatan	Terlaksananya tata kelola organisasi yang profesional	Persentase pelaksanaan kinerja program dan kegiatan	%	Persentase sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal dengan meningkatkan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan	Jml prog & keg yg terlaksana Jumlah Prog & keg dalam 1 thn	BPBD	
		Meningkatnya kinerja keuangan, program dan keuangan		Persentase kinerja keuangan, program dan keuangan	%	Persentase sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal dengan meningkatkan kinerja keuangan, program dan keuangan	Lap kinerja yang tersusun Jumlah lap kinerja yg hrs disusun dalam 1 tahun	BPBD	
		Meningkatnya nilai LKJiP		Nilai LKJiP	%	Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, dengan meningkatkan nilai LKJiP	Nilai LKJiP OPD Nilai LKJiP Kabupaten	BPBD	
		Meningkatnya Jumlah anggota linmas yang ditingkatkan pemahamannya	Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah anggota linmas yang ditingkatkan pemahamannya	Orang	Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, dengan meningkatkan jumlah linmas yang ditingkatkan pemahamannya	Jumlah Linmas yang dilatih Jumlah Linmas Kabupaten	BPBD	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
		Meningkatnya Jumlah relawan		Jumlah relawan	Orang	Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, dengan meningkatkan jumlah relawan yang ditingkatkan pemahamannya	$\frac{\text{Jumlah relawan yang dilatih}}{\text{Jumlah relawan BPBD}}$	BPBD	
		Meningkatnya Tingkat waktu tanggap (respon time rata) daerah layanan		Tingkat waktu tanggap (respon time rata) daerah layanan	Menit	Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, dengan meningkatkan waktu tanggap daerah layanan	$\frac{\text{Jumlah waktu respon}}{60 \text{ menit}}$	BPBD	
		Meningkatnya aparatur penanggulangan bencana yang memenuhi standar kualifikasi		Persentase aparatur penanggulangan bencana yang memenuhi standar kualifikasi	%	Persentase sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal dengan meningkatkan jumlah aparatur penanggulangan bencana yang memenuhi standar kualifikasi	$\frac{\text{Jml aparatur BPBD yang terlatih}}{\text{Jumlah aparatur BPBD}}$	BPBD	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
		Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bencana di Kabupaten Blora		Cakupan pelayanan penanganan bencana di Kabupaten Blora	%	Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, dengan meningkatkan cakupan pelayanan penanganan bencana di Kabupaten Blora	$\frac{\text{Jml pelayanan bencana}}{\text{Jumlah bencana kab blora}}$	BPBD	
		Meningkatnya korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	Persentase sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal dengan meningkatnya jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah penerima bantuan}}{\text{Jumlah korban bencana}}$	BPBD	
		Meningkatnya Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	Persentase sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal dengan meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jml pelayanan \& rehabilitasi}}{\text{Jumlah kejadian bencana}}$	BPBD	



**9. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
1	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat penyandang permasalahan sosial (PMKS)	Persentase tertanganinya permasalahan sosial  Persentase menurunnya permasalahan sosial	Meningkatnya Pelayanan PMKS di Kabupaten Blora	Persentase PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	Untuk mengetahui besarnya PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan}} \times 100$	Database PMKS Dinsos P3A Kab. Blora dan laporan realisasi kegiatan penyaluran bantuan	
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan Pengarus Utamaan Gender	persentase SKPD yang menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD  Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  Tingkat capaian kabupaten layak anak	Meningkatnya kualitas kelembagaan Pengarus Utamaan Gender	Persentase SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	%	Untuk mengetahui analisis gender dalam SKPD	$\frac{\text{Jumlah SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100$	Bidang P3A	

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET/ KRITERIA</b>
3	Meningkatkan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<p>Persentase tertanganinya kasus kekerasan perempuan dan anak</p> <hr/> <p>Persentase penurunan kasus kekerasan perempuan dan anak</p>	Meningkatnya pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	Untuk mengetahui besarnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan}}{\text{Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan}} \times 100$	Bidang P3A	

**10. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH meningkat	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora	%	Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	$= \frac{\text{Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora}}{\text{Total penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora}} \times 100$	DLH	
		Indeks Kualitas Air Meningkat		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air		Untuk mengetahui Indeks Kualitas Air	$: IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$	DLH	
		Indeks Kualitas Udara Meningkat		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara		Untuk mengetahui Indeks Kualitas Udara	$= IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	DLH	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkat		Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan		Untuk mengetahui Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$= IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$	DLH	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
		Sampah yang tertangani meningkat	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	Untuk mengetahui banyaknya sampah yang tertangani	$\text{Persentase sampah yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{Total jumlah timbulan sampah di Kabupaten Blora (ton)}} \times 100 \%$	DLH	

**11. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase bayi berakte kelahiran	%	Untuk mengetahui seberapa besar persentase bayi lahir ditahun bersangkutan yang memiliki akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi yang lahir di (tahun n) yg berakte}}{\text{Jumlah bayi yang lahir di (tahun n)}} \times 100\%$	Dindukcapil	
				Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	%	Untuk mengetahui persentase anak usia 0-18 bulan pada tahun yang telah bersangkutan memiliki akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang berakta}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	Dindukcapil	
				Persentase penduduk berKTP	%	Untuk mengetahui persentase wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah berKTP}}{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah}} \times 100\%$	Dindukcapil	

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET / KRITERIA</b>
				Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Untuk mengetahui persentase anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun (- 1) hari yg memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun (-1 ) hari}} \times 100\%$	Dindikcapil	

**12. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PMD KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa	Jumlah desa berdikari	Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Posyantek Aktif	unit	Untuk melihat perkembangan jumlah Posyantek Aktif	Jumlah Posyantek Aktif	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
		Persentase swakelola dana desa		Persentase pelaksanaan TMMMD, Desa berkembang, dan bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik	%	Untuk melihat perkembangan pelaksanaan TMMMD, Desa berkembang dan Bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik	$\text{Persentase pelaksanaan TMMMD, Desa berkembang, dan bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik} = \frac{\text{pelaksanaan TMMMD, desa berkembang, bantuan keuangan yang dilaksanakan dengan baik}}{\text{pelaksanaan TMMMD, desa berkembang, bantuan keuangan yang ada}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan Desa	
		Cakupan peningkatan ketrampilan kelompok perempuan pedesaan		Persentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	%	Untuk mengetahui perkembangan penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	$\text{Persentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah penetapan RPJM Desa, musrenbangdes, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah penetapan RPJM Desa, musrenbangdes, RKP Desa dan APB Desa yg ada}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan desa	
		Jumlah BUMDes yang aktif							
		Persentase posyantek yang aktif							

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
			Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan	Persentase jumlah BUMDes yang diperdeskan	%	Untuk mengetahui perkembangan jumlah BUMDes yang diperdeskan	$\text{Persentase jumlah BUMDes yang diperdeskan} = \frac{\text{Jumlah BUM Desa yang diperdeskan}}{\text{Jumlah BUM Desa yang terbentuk}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
				Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Kelompok	Untuk mengetahui perkembangan jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Bidang Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya	
				Persentase posyandu aktif	%	Untuk mengetahui perkembangan posyandu aktif	$\text{Persentase posyandu aktif} = \frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Jumlah posyandu yang ada}} \times 100 \%$	Bidang Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya	
				Persentase kategori desa/ kelurahan	%	Untuk mengetahui perkembangan kategori desa	$\text{Persentase kategori desa} = \frac{\text{Jumlah kategori desa/ kelurahan}}{\text{Jumlah desa/ kelurahan}} \times 100 \%$	Bidang Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya	
				Persentase aparatur pemerintah desa yang telah dilatih	%	Untuk mengetahui aparatur pemerintah desa yang telah dilatih	$\text{Persentase aparatur pemerintah desa yang telah dilatih} = \frac{\text{Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih}}{\text{Jumlah aparatur pemerintah desa}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan Desa	



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
			Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Persentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	%	Untuk mengetahui perkembangan penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	$\text{Persentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur} = \frac{\text{Jumlah anggaran desa utk infrastruktur}}{\text{Jumlah anggaran desa}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan Desa	
				Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	orang	Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja desa yang terserap	Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	Bidang Pengembangan Desa	

**13. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan terciptanya Pembangunan Keluarga	Persentase pemakaian kontrasepsi/C PR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan pelayan Program KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber KB	%	Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat ikut ber KB	$\text{Persentase Pasangan Usia Subur yang Ber KB} = \frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)		Jumlah Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 tahun	Angka	Untuk mengetahui rata-rata jumlah anak yang akan dimiliki wanita usia subur selama masa reproduksi	$5 \sum_{i=1}^7 \text{ASFR}_i$ <p>Nilai i = 1,2,3,4,5,6,7 ASFR<sub>i</sub> = Wanita kelompok umur 5 tahunan</p>	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai kontrasepsi/ DO)	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan atau keberlanjutan ekseptor dalam ber KB	Jumlah peserta aktif tahun lalu + peserta baru tahun sekarang – peserta aktif tahun sekarang	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Jumlah kampung KB (Center of Excellent / COE) / Percontohan yang terbentuk	Angka	Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga	Jumlah Kampung KB Percontohan di setiap kecamatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
				Unmet need	%	Untuk mengetahui cakupan PUS ingin ber KB tidak terpenuhi (unmetneed)	$\frac{\text{Ingin Anak diTunda (IAT) + Tidak Ingin Anak Lagi (TIA)}}{\text{PUS}} \times 100 \%$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				MKJP	%	Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat ikut ber KB menggunakan MKJP	$\frac{\text{IUD + MOW + MOP + Implant}}{\text{PUS}} \times 100 \%$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**14. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1.	Meningkatnya akurabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik	Presentase keterisian data SIPD	-	-	%	Untuk mengetahui persentase / besaran data yang telah terisi dalam SIPD	Rasio data yang telah terisi dalam SIPD = $\frac{\text{Jumlah data yang telah terisi dalam SIPD}}{\text{Jumlah data seharusnya}} \times 100\%$	DINKOMINFO	
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK	Jumlah aplikasi sistem informasi yang diadakan dan diperbarui Pemkab Blora	Buah	Untuk mengevaluasi jumlah aplikasi sistem informasi yang diadakan dan diperbarui Pemkab Blora	Jumlah OPD yang memiliki aplikasi sistem informasi = $\frac{\text{Jumlaj aplikasi sistem informasi}}{\text{Jumlah OPD}}$	DINKOMINFO	
			Meningkatkan penyampaian informasi Pemkab Blora	Rasio jumlah penyampaian informasi melalui PPID	%	Untuk mengevaluasi presentase jumlah informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Rasio jumlah penyampaian informasi melalui PPID = $\frac{\text{Jumlah informasi yang diupload di website Pemkab Blora}}{\text{Jumlah informasi yang seharusnya}} \times 100\%$	DINKOMINFO	
			Meningkatkan jumlah data statistik sektoral	Rasio jumlah data statistik sektoral	%	Untuk mengevaluasi presentase jumlah data statistik sektoral	Rasio jumlah data statistik sektoral = $\frac{\text{Jumlah data yang diupload di website Pemkab Blora}}{\text{Jumlah data yang seharusnya}} \times 100\%$	DINKOMINFO	

**15. INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPSTSP KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatnya nilai realisasi berinvestasi di Kab. Blora	Nilai realisasi investasi	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMDN / PMA)	Jumlah PMDN / PMA	Perusahaan	Untuk mengetahui berapa jumlah perusahaan (PMA/ PMDN) di Kab. Blora, mengingat dengan adanya perusahaan merupakan salah satu unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) pada tahun ke-n	DPMPTSP Kab. Blora	DPMPTSP menargetkan setiap tahunnya, jumlah persentase pertumbuhan realisasi PMDN dan PMA berkisar 10%
			Meningkatnya penyelenggaraan PTSP yang praktis dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Untuk mengevaluasi pelayanan terpadu satu pintu	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi x nilai penimbang}} \times 100\%$		

**16. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PORABUDPAR KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	Peningkatan jumlah kunjungan wisata di obyek wisata unggulan daerah	Jumlah kunjungan wisata di obyek wisata unggulan daerah	Jumlah kunjungan wisatawan di obyek unggulan daerah	Orang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata	Banyaknya orang yang berkunjung di objek wisata unggulan daerah	Dinporabudpar	
2	Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga, serta apresiasi seni dan budaya daerah	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Perolehan medali meningkat	Jumlah medali yang diperoleh	Dinporabudpar	
				Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	Orang	Pemuda berwirausaha meningkat	Jumlah pemuda yang berwirausaha		
		Peningkatan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Benda situs cagar budaya yang dilestarikan	%	Persentase benda situs cagar budaya yang dilestarikan meningkat	$\frac{\text{Jumlah benda situs cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah benda situs cagar budaya yang ada}} \times 100\%$	Dinporabudpar	
Persentase kelompok seni yang dibina	%	Persentase kelompok seni yang dibina meningkat	$\frac{\text{Jumlah kelompok seni yang dibina}}{\text{Jumlah kelompok seni yang ada}} \times 100\%$						

**17. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Dokumen/Arsip yang terpelihara dengan baik	Meningkatnya Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Baku	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	Mengetahui tingkat pencapaian pengelolaan arsip secara baku	$\text{Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku} = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Blora}} \times 100\%$	Bidang Kearsipan	
			Meningkatnya Akuntabilitas Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	%	Mengetahui tingkat keberhasilan capaian pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah	$\text{Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah} = \frac{\text{Jumlah realisasi anggaran program/kegiatan}}{\text{Jumlah anggaran program/kegiatan}} \times 100\%$	Sekretariat	
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Meningkatnya jumlah pengunjung ke Perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	%	Untuk mengetahui tingkat kunjungan ke perpustakaan selama satu tahun	$\text{Persentase jumlah pengunjung perpustakaan pertahun} = \frac{\text{Jumlah pengunjung di Perpustakaan Daerah Kab. Blora}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Baca (3-60 th)}} \times 100\%$	Bidang Perpustakaan	

**18. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan produksi hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) dan Peningkatan SDM Pertanian	Tercapainya produksi dan produktifitas pertanian	Produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Peningkatan produksi tanaman pangan utama	ton	Untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan produksi komoditas tanaman pangan	Produksi = Produktivitas X Luas Panen	Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan	
				Peningkatan produksi hortikultura utama	ton	Untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan produksi komoditas hortikultura			
				Peningkatan produksi perkebunan utama	ton	Untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan produksi komoditas perkebunan			
		Jumlah tenaga penyuluh yang meningkat kompetensinya	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Sumber Daya Pertanian	Cakupan Bina kelompok tani	%	Untuk mengevaluasi berapa persentase kelompok tani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	Persentase Kelompok = $\frac{\text{Jumlah Kelompok Yang Diberikan Pelatihan}}{\text{Jumlah Klp. Tani}} \times 100\%$	Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan	
				persentase peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian	%	Untuk mengetahui persentase penyuluh pertanian yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi	Persentase Penyuluh = $\frac{\text{Jumlah Penyuluh Yang Diberikan Pelatihan}}{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian}} \times 100\%$	Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan	



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Tersedianya cadangan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan daerah	Ketersediaan pangan utama	Ton	Untuk mengetahui ketersediaan pangan utama di Kab. Blora	$\text{Ketersediaan Pangan} = \frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Konsumsi selama 1 tahun}}$	Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan	
				Ketersediaan pangan alternatif	Ton	Untuk mengetahui ketersediaan pangan alternatif di Kab. Blora			

**19. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan produktivitas peternakan dan perikanan sebagai penunjang ketahanan pangan	Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein	Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan, populasi ternak dan kesehatan hewan ternak	Jumlah sapi potong	Ekor	Sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan populasi sapi potong	Jumlah Sapi Potong di Kabupaten Blora	Dinakikan	Target akhir RPJMD: 278.397 ekor
		Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein		Jumlah kambing	Ekor	Sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan populasi kambing	Jumlah Kambing di Kabupaten Blora	Dinakikan	Target Akhir RPJMD: 149.113 ekor
				Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	Untuk mengevaluasi capaian peningkatan produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan = Produktivitas perikanan x Luas Kolam	Dinakikan	Target Akhir RPJMD: 450 Ton
				Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	Untuk mengevaluasi capaian peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Dinakikan	Target Akhir RPJMD: 300 Ton

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
				Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/kapita /thn	Untuk mengevaluasi capaian tingkat konsumsi ikan penduduk	Konsumsi Ikan = Ketersediaan Ikan / Jumlah Penduduk	Dinakikan	Target Akhir RPJMD: 11 kg/kap/thn
				Jumlah produksi hasil olahan ikan	Ton	Untuk mengevaluasi capaian peningkatan produksi hasil olahan ikan	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Dinakikan	Target Akhir RPJMD: 962 Ton
				Persentase tingkat cakupan bina kelompok budidaya ikan	%	Untuk mengevaluasi cakupan bina kelompok budidaya ikan	$\text{Cakupan Bina Kelp.} = \frac{\text{Kelp. Budidaya Ikan Yang Mendapat Pembinaan}}{\text{Jumlah Kelp. Budidaya Ikan}} \times 100\%$	Dinakikan	Target Akhir RPJMD: 65%
				Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit	Ekor	Untuk mengevaluasi capaian jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit	Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit	Dinakikan	Target Akhir RPJMD: 13.000 ekor
				Jumlah promosi pemasaran hasil peternakan unggulan daerah	kali	Untuk mengevaluasi capaian jumlah promosi pemasaran hasil peternakan unggulan daerah	Jumlah pameran dan atau lomba ternak	Dinakikan	Target Akhir RPJMD: 3 kali

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET / KRITERIA</b>
				Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	lokasi	Untuk mengevaluasi capaian jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah lokasi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Dinakikan	Target Akhir RPJMD: 30 lokasi
				Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan	unit	Untuk mengevaluasi capaian jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan	Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan	Dinakikan	Target Akhir RPJMD: 44 Unit

**20. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat masyarakat di sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sector perdagangan	Meningkatnya kualitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Persentase koperasi sehat	%	Untuk mengevaluasi seberapa besar persentase koperasi simpan pinjam yang sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi simpan pinjam sehat}}{\text{Jumlah koperasi simpan pinjam/USP keseluruhan}} \times 100\%$	Dindagkop dan UKM	
				Jumlah usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Unit	Untuk mengevaluasi perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Dindagkop dan UKM	
			Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional	Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora	US\$	Untuk mengetahui perkembangan nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora	Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora	Dindagkop dan UKM	
				Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	%	Untuk mengetahui kualitas pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan}}{\text{Jumlah pasar tradisional keseluruhan}} \times 100\%$	Dindagkop dan UKM	

**21. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. BLORA**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET / KRITERIA</b>
1.	Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	Untuk mengetahui persentase pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pendaftar pencari kerja}} \times 100$	Dinperinaker	Pencari kerja berdasar data pencari kartu pencaker/ AK1 tercatat
2.	Meningkatkan jumlah industri	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya jumlah industri	Jumlah industri	unit	Untuk melihat seberapa besar pertumbuhan industri	Jumlah Industri	Dinperinaker	

**22. INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peringkat pangripta / PPD tingkat provinsi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	Untuk mengetahui seberapa besar usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah usulan musrenbang Kec. yang terakomodir dalam RKPD}}{\text{Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD}} \times 100\%$	Bappeda	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase/nilai komponen perencanaan strategis dalam evaluasi SAKIP	%	Untuk mengevaluasi seberapa besar nilai perencanaan strategis dalam evaluasi SAKIP	$\text{Nilai Persentase sub komponen Perencanaan Strategis dalam hasil evaluasi SAKIP}$	Bagian Ortala	
			Meningkatnya Konsistensi antara Dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%	Untuk mengetahui seberapa besar program dalam RKPD yang diterapkan dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program dalam APBD sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam APBD}} \times 100\%$	Bappeda	
				Persentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%	Untuk mengetahui seberapa besar Kegiatan dalam RKPD yang diterapkan dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan dalam APBD sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Kegiatan dalam APBD}} \times 100\%$	Bappeda	
2	Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan daerah	Jumlah keikutsertaan masyarakat dan <i>stake holder</i> dalam penelitian dan pengembangan	Meningkatnya penerapan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis penelitian	Persentase hasil riset yang dijadikan rekomendasi dalam menentukan kebijakan daerah	%	Untuk mengetahui seberapa besar hasil penelitian yang dihasilkan diaplikasikan oleh SKPD	$\frac{\text{Hasil Penelitian yang diterapkan}}{\text{Jumlah Penelitian}} \times 100\%$	Bappeda	Riset diantaranya krenova, penelitian tentang Blora, RUD

**23. INDIKATOR KINERJA UTAMA BPPKAD KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan PAD terutama sektor pajak	Meningkatnya PAD terutama dari sektor pajak	Persentase peningkatan PAD tiap tahun	%	Untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah per tahun	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun } n - \text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun } (n-1)} \times 100\%$	BPPKAD	
		Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Opini pemeriksa atas (LKPD) Laporan Keuangan Peme rintah Daerah )	Status	Untuk melihat kualitas Laporan Keuangan Daerah. Indikator ini penting untuk mendorong terjadinya tertib manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	BPPKAD	
		Tertib administrasi pengelolaan aset daerah yang akuntabel	Mewujudkan tertib administrasi pengelola daerah yang akuntabelan aset	Terwujudnya tertibAdministrasi Pengelolaan Aset daerah yang akuntabel	%	Utuk melihat kwantitas sertipikat tanah pemerintah daerah	Persentase tanah milik pemkab yang bersertifikat dan Barang Milik Daerah (BMD)	BPPKAD	



**24. INDIKATOR KINERJA UTAMA BKD KAB BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan kapasitas, kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara dan Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat	Indeks Profesionalitas Aparatur	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Persentase Pejabat sesuai kompetensi	%	Mencerminkan tingkat kesesuaian dalam pengisian jabatan.	$IP = \frac{\text{Jumlah PNS memenuhi syarat menduduki jabatan administrasi dan fungsional}}{\text{Jumlah pejabat administrasi dan fungsional}} \times 100\%$	Internal BKD (Bagian jabatan)	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	%	Mencerminkan tingkat ideal jumlah aparatur	$\frac{\text{Jumlah PNS yang ada}}{\text{Jumlah PNS yang seharusnya ada}} \times 100\%$	Internal BKD (Laporan kebutuhan formasi CPNS)	
			Meningkatnya disiplin sumber daya Aparatur	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	%	Mencerminkan tingkat kepastian hukum terhadap kasus-kasus kepegawaian dan proses perkawinan / perceraian PNS	$\frac{\text{Jumlah kasus izin perkawinan dan perceraian yang telah selesai}}{\text{Jumlah kasus izin perkawinan dan perceraian yang ditangani BKD}} \times 100\%$	Internal BKD (bagian penegakan disiplin)	
		Indeks kepuasan masyarakat / penerima layanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase kepuasan masyarakat / penerima layanan administrasi kepegawaian (non kumulatif)	%	Merupakan bagian dari Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk umpan balik pelayanan BKD	$\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$	Data primer dari responden ( <i>beneficiaries</i> )	

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET / KRITERIA</b>
			Meningkatnya akurasi data kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian	%	Mencerminkan updating data PNS dalam aplikasi SIMPEG	$\frac{\text{Jumlah data PNS yang akurat}}{\text{Jumlah data PNS yang seharusnya terisi}} \times 100\%$	Internal BKD (admin SIMPEG)	
			Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Huruf	Mencerminkan tingkat ketertiban administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Sesuai ketentuan penilaian SAKIP SKPD	Tim Penilai SAKIP OPD	

**25. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan kebijakan dan koordinasi administrasi bidang Pemerintahan dan hukum, bidang ekonomi pembangunan kesra serta bidang administrasi dan pelayanan informasi publik	Persentase jumlah kebijakan dan koordinasi administrasi bidang pemerintahan dan hukum, bidang ekonomi, Pembangunan dan kesra serta bidang administrasi, informasi publik	Meningkatnya tertib administrasi bidang pemerintahan dan hukum yang transparan dan akuntabel	jumlah penanganan pengaduan kasus masyarakat	kasus	Untuk mengetahui jumlah pengaduan masyarakat	Jumlah Terget dan Realisasi Kasus pada tahun berjalan	Bagian Hukum	
				Persentase penataan peraturan perundang-undangan	%	Untuk mengetahui persentase penataan peraturan perundang-undangan yang disahkan	Peraturan Per-UUan yang disahkan dibagi Total Peraturan Per UUan yang diajukan x 100 persen	Bagian Hukum	
				Tersusunnya rekomendasi kebijakan kerja sama antar pemda	Dokumen	Untuk mengetahui rekomendasi pemenuhan kerjasama antar pemerintah daerah	Jumlah peningkatan kerjasama yang dihasilkan	Bagian Tapem	
				Jumlah dokumen Perda dan Perbup yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	Dokumen	Untuk mengetahui Jumlah dokumen Perda dan Perbup yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perda dan Perbup pada tahun berjalan	Bagian Hukum	
				Persentase pemenuhan koordinasi bidang pertanahan dan permukaan bumi	%	Untuk mengetahui persentase koordinasi bidang pertanahan dan permukaan bumi	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi pengadaan tanah yang terselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan fasilitasi pengadaan tanah}} \times 100 \%$	Bagian Tapem	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA	
			Meningkatnya tertib administrasi bidang ekonomi, pembangunan, dan kesra yang transparan dan akuntabel	Persentase Pemenuhan program koordinasi terpadu bidang perekonomian	%	Untuk mengetahui persentase program koordinasi terpadu bidang perekonomian	$\frac{\text{Realisasi capaian kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah anggaran pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Bagian Perekonomian		
				jumlah perangkat daerah dalam pelaksanaan APBD yang realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target	%	Untuk mengetahui % jumlah perangkat daerah dalam pelaksanaan APBD yang realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang dalam pelaksanaan APBD realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target}}{\text{Jumlah perangkat daerah se Kabupaten Blora}} \times 100\%$	Bagian Adm. Pembangunan		
				Persentase jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui ULP	%	Untuk mengetahui Persentase jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui ULP	$\frac{\text{Jumlah paket pengadaan barang / jasa pemerintah yang dilaksanakan di ULP}}{\text{Jumlah pengadaan melalui tender yang diumumkan di SiRUP}} \times 100\%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
				Persentase Kesuksesan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	Untuk mengetahui Persentase Kesuksesan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	$\frac{\text{Jumlah capaian koordinasi dan pemantauan Bidang Kesra}}{\text{Jumlah total koordinasi dan Pemantauan bidang kesra}} \times 100\%$	Bagian Kesra		
				Persentase jumlah SKPD yang melaporkan TEPRa melalui Sismonteptra tepat waktu	%	Untuk mengetahui Persentase jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan TEPRa melalui Sismonteptra tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan TEPRa melalui Sismonteptra tepat waktu}}{\text{Jumlah PD se Kabupaten Blora}} \times 100\%$	Bagian Adm. Pembangunan		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
			Meningkatnya tertib administrasi, administrasi kepegawaian, aset dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi struktur dan uraian tugasnya	Jumlah Perangkat Daerah	Untuk mengetahui jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi struktur dan uraian tugasnya	Jumlah Perangkat Daerah keseluruhan di Kabupaten Blora	Bagian Ortala	
				Laporan Hasil Evaluasi ( LHE ) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	Untuk mengetahui nilai Laporan Hasil Evaluasi ( LHE ) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi Sakip oleh Kemenpan RB	Bagian Ortala	
				Persentase perangkat daerah dengan Skor nilai pelayanan publik "baik"	%	Untuk mengetahui Persentase perangkat daerah dengan Skor nilai pelayanan publik " baik "	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai unit pelayanan publik "baik"}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah keseluruhan}} \times 100\%$	Bagian Ortala	
				Persentase aparatur sipil negara yang mendapatkan pelatihan peningkatan kinerja	%	Untuk mengetahui Persentase aparatur sipil negara yang mendapatkan pelatihan peningkatan kinerja	$\frac{\text{Jumlah aparatur sipil negara yang mendapatkan pelatihan peningkatan kinerja}}{\text{Jumlah seluruh aparatur sipil negara}} \times 100\%$	Bagian Ortala	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
				Jumlah kegiatan kepala daerah yang dipublikasikan melalui media massa/elektronik	Kali	Untuk mengetahui jumlah kegiatan kepala daerah yang dipublikasikan melalui media massa/elektronik	Jumlah keseluruhan kegiatan kepala daerah yang dipublikasikan melalui media massa / elektronik	Bagian Humas dan Protokol	
				Persentase pelayanan kedinasan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	Untuk mengetahui Persentase pelayanan kedinasan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah jenis pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah}} \times 100\%$	Bagian Umum	
				Persentase pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	%	Untuk mengetahui persentase pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pelaporan Kinerja dan Keuangan}}{\text{Jumlah total kebutuhan Pelaporan kinerja dan Keuangan}} \times 100\%$	Bagian Umum	

**26. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
1	Meningkatnya kinerja DPRD dalam fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran	Peningkatan kualitas kinerja dan fungsi Dewan serta fasilitasi oleh Sekretariat DPRD	Meningkatnya penetapan Perda	Persentase Ranperda masuk Prolegda (Propem Perda) yang dibahas dan ditetapkan	%	Untuk mengetahui banyaknya Ranperda masuk Prolegda (Propemperda) yang Dibahas dan Ditetapkan.	$\frac{\text{Persentase Raperda masuk Prolegda (Propemperda) yang Dibahas dan Ditetapkan}}{\text{Jumlah Raperda masuk Prolegda (Propemperda) yang Dibahas dan Ditetapkan}} \times 100\%$		
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD	Persentase realisasi keuangan program dan kegiatan	%	Untuk mengetahui besarnya realisasi keuangan program dan kegiatan	$\frac{\text{Persentase Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan}}{\text{Realisasi keuangan program dan kegiatan}} \times 100\%$		
				Persentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	%	Untuk mengetahui besarnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	$\frac{\text{Persentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan}}{\text{Target program dan kegiatan}} \times 100\%$		
				Nilai LKJiP	Nilai	Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Blora	Nilai hasil evaluasi LKJiP		

**27. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat pada kecamatan	Prosentase pemenuhan koordinasi tingkat kecamatan	%	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi capaian koordinasi di tingkat Kecamatan	<p>Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Pembangunan, Pem-berdayaan Masyarakat dan Desa, dan pelayanan perijinan</p> <p>_____ X 100%</p> <p>Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pelayanan perijinan dalam satu tahun</p>	Kecamatan	
			Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	Nilai LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	%	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	Hasil evaluasi Sakip Kecamatan yang dinilai oleh Inspektorat	Kecamatan	



**28. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET/ KRITERIA
1	Terwujudnya pengawasan yang profesional guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di Kabupaten Blora	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas kinerja OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas kinerja OPD	Terselesaikannya Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	Untuk mengevaluasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	$\text{Rasio Rekomendasi dan Tindak Lanjut} = \frac{\text{Rekomendasi \& Tindak Lanjut}}{\text{Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut}} \times 100$	Data isian SKPD	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPK RI
				Tingkat Maturitas SPIP	Level	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengevaluasi capaian implementasi SPIP pada Level 3 untuk Thn 2019</li> <li>- Surat Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jateng No: S1169/PW11/3/ 2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal : Penetapan Target Indikator Pembangunan</li> </ul>	Level SPIP	Data isian SKPD	Data Laporan Pelaksanaan SPIP
				Kapabilitas APIP	Level	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jateng No. : S1169/PW/11/ 3/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal : Penetapan target Indikator Pembangunan Bidang Aparatur Negara &amp; Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam RPJMD</li> </ul>	Hasil Penilaian BPKP	Data Isian SKPD	Data Penilaian Kapabilitas APIP

**29. INDIKATOR KINERJA UTAMA KESBANGPOL KAB. BLORA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHIITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatkan Kondusifitas masyarakat yang rukun, damai, harmonis dan toleran bagi segenap elemen masyarakat guna tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI	Kondusifitas masyarakat di daerah	Meningkatnya wawasan kabangsaan dan nasioanalisme masyarakat	Jumlah tokoh masyarakat yang memahami toleransi kerukunan umat beragama, pemahaman nilai solidaritas di kalangan masyarakat serta budaya luhur budaya bangsa	Orang	Semakin banyak tokoh masyarakat yang wawsan kebangsaaannya baik maka kondusifitas akan terpelihara dengan baik	Jumlah komulatif peserta kegiatan	Kantor Kesbangpol	
			Meningkatnya kondusifitas Kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pembekalan kader FKDM)	Orang	Jumlah yang dilatih semakin banyak maka kondusifitas semakin baik	Jumlah komulatif	Kantor Kesbangpol	
				Rakor Kominda	Kali	Jumlah Rakor dilaksanakan secara berkala dan insidental untuk pemantapan kondusifitas daerah	Jumlah komulatif	Kantor Kesbangpol	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan miras / narkoba	Jumlah peserta penyuluhan narkoba	Orang	Semakin banyak anggota masyarakat yang mendapatkan penyuluhan maka akan memperkecil / mengurangi penyalahgunaan narkoba	Jumlah komulatif	Kantor Kesbangpol	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
			Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam demokrasi dan berpolitik	Pembinaan politik daerah	Kali	Semakin banyak dilakukan pendidikan politik, maka kesadaran politik masyarakat meningkat	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kantor Kesbangpol	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Program dan Kegiatan (Non IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian nilai LKjIP Perangkat Daerah</li> <li>2. Persentase realisasi keuangan program dan kegiatan</li> <li>3. Persentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan</li> </ol>	Peringkat nilai	Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja yang semakin akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peringkat nilai yang semakin baik</li> <li>2. Serapan anggaran: Pagu anggaran X 100%</li> <li>3. Jumlah kegiatan yang terlaksana: Jumlah kegiatan yang direncanakan x100%</li> </ol>	Kantor Kesbangpol	

BUPATI BLORA,

Cap ttd  
DJOKO NUGROHO